

BAB II

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Rerangka Teori

1. Kecakapan Managerial

Isnugrahadi (2009) mengemukakan bahwa seorang manager dikatakan cakap apabila manager tersebut memiliki keahlian yang memadai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Keahlian itu biasa didapatkan manager karena mereka biasanya mempunyai tingkat intelegensia dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Pengalaman juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan tingkat kecanggihan seorang manager. Semakin berpengalaman seorang manager biasanya berbanding lurus dengan pemahaman manager tersebut akan kondisi bisnis perusahaannya. Manager dalam menjalankan tugasnya juga dipandu oleh *explicit professional codes of conduct* atau *implicit codes of ethics*, sehingga setiap keputusan manager semestinya merefleksikan pertimbangan professional manager tersebut, bukan sebuah keputusan penuh rekayasa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Setiap keputusan manager pada akhirnya akan mempunyai dampak pada perusahaan yang mereka pimpin yaitu pengambilan keputusan tingkat perusahaan merefleksikan tingkat kecakapan dari manager yang berbeda-beda. Badan standar akuntansi memperbolehkan manager menggunakan *judgment* dalam membuat laporan keuangan dengan tujuan agar laporan tersebut sesuai

dengan kondisi bisnis masing-masing perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai dari akuntansi sebagai suatu bentuk komunikasi. Healy dan Wahlen (1999) mencontohkan beberapa bentuk dari *judgment* manager dalam laporan keuangan tersebut, misalnya adalah pengestimasiian kejadian-kejadian yang mengandung nilai ekonomis di masa dating seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai sisa dari aktiva jangka panjang.

2. Manajemen Laba

Isnugrahadi (2009) mengemukakan bahwa, manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen laba yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan. Healy dan Wahlen dalam Isnugrahadi (2009), mengemukakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manager menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Senada dengan

...tion manajemen laba menurut Healy dan Wahlen dalam Isnugrahadi

(2009) seperti tersebut di atas, Setiawati dan Na'im (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Healy dan Wahlen dalam Nuryaman (2007) mengemukakan beberapa faktor yang memotivasi terjadinya manajemen laba yaitu:

1) *Taxation Motivations*

Manajer akan berusaha menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

2) *Changes of chief executive officer (CEO)*

Pada pergantian CEO, CEO baru akan cenderung melakukan *earnings management* dengan melaporkan laba lebih rendah pada awal masa jabatannya sehingga pada periode berikutnya laba akan dilaporkan lebih besar.

3) *Political motivation*

Manajer akan berusaha menurunkan laba dengan berbagai macam tujuan, seperti: untuk mengurangi biaya politik dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, dan untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh.

4) *Stock price effects*

Manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi pasar, yaitu persepsi investor agar investor tertarik untuk

5) *Contracting incentives*

Motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah untuk memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang (*debt covenants*). Nurul dan Zaki dalam Nuryaman (2007) membuktikan bahwa perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan praktek manajemen laba yang menaikkan laba yang dilaporkan pada periode sebelum terjadi pelanggaran.

6) *Bonus plan*

Bonus plan sebagai pendorong manajemen laba, karena laba dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan, dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Menurut Watts and Zimmerman dalam Julia dkk (2005) pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

Kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba timbul karena: (Setiawati dan Na'im 2000):

a. Kelemahan standar akuntansi

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Worthy dalam Setiawati dan Na'im (2000), fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh:

1) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk

menetapkan suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda

2) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi.

b. Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar

Manajer relatif memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak luar (termasuk investor). Mustahil bagi pihak luar untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajemen secara detail. Pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan manajemen laba harus dilakukan dengan penuh kecermatan. Suwarno dalam Reni (2004) mengemukakan beberapa pola manajemen laba, antar lain:

1) *Taking a bath*

Pola *taking a bath* dapat terjadi pada periode dimana perusahaan mengalami tekanan atau *reorganization stress*, pergantian CEO dan apabila laba perusahaan berada di bawah *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus).

2) *Income Minimization*

Pola *income minimization* mirip *taking a bath* tetapi tidak ekstrim. Pola ini dipilih jika perusahaan mengalami tekanan politik atau jika perusahaan akan melaporkan penghasilan kena pajaknya.

3) *Income Maximization*

Pola *income maximization* cenderung dipilih manajer yang mengharapkan

4) *Income smoothing*

Pola *income smoothing* dipilih jika manajemen ingin melaporkan laba (*earnings*) yang stabil. Misalnya manajemen mengharapkan bonus yang berkelanjutan, maka manajemen akan melakukan *income smoothing*.

3. Teori Keagenan

Agency theory atau teori keagenan menurut Jensen & Meckling dalam Susilawati (2000) adalah hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan. Pemberi kerja yang disebut *principal* akan memberikan hak pada orang lain yang disebut sebagai *agent* untuk menjalankan haknya. Kedua belah pihak diikat oleh kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Anggapan yang melekat pada teori keagenan adalah bahwa terdapat *conflict of interest* antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Konflik tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap individu akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri, sehingga ada alasan untuk percaya bahwa manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham (Jensen & Meckling dalam Susilawati 2000).

Manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menggunakan informasi yang diketahuinya

Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya kejahatan moral (*moral hazard*) berupa usaha manajemen (*management effort*) untuk melakukan *earnings management*. Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007):

4. Mekanisme *Corporate Governance*

OECD (2004) dan FCGI (2001) dalam Boediono (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Lebih lanjut Monk dalam Nuryaman (2007) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang

memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Menurut Lins dan Warnot dalam Dwiyana (2007) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajer sering disebut mekanisme *corporate governance*, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama* adalah mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri dari struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. *Kedua* adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporasi. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi: konsentrasi kepemilikan oleh individu, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

a) **Konsentrasi Kepemilikan**

Apabila kepemilikan terkonsentrasi, *large shareholder* (pemilik dengan persentase kepemilikan tinggi) dapat memainkan peranan dalam pengawasan manajemen. Menurut Shleifer dan Vishny dalam Tri (2003), pemilik besar dapat melakukan pengawasan karena dapat mendapatkan informasi dan memonitor manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. Khususnya pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 51%, akan mempunyai hak pengendalian langsung atas perusahaan dan manajemen.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi baik hutang maupun ekuitas pada beberapa investor akan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat terjadi karena dengan terkonsentrasinya kepemilikan akan memberikan insentif

dengan kepentingan pemilik. Demsetz dan Lehn dalam Tri (2003) misalnya, menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan menghilangkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena insentif yang dimiliki pemilik untuk memonitor manajer. Konflik ini muncul karena kepentingan yang berbeda antara pemilik dengan manajer. Penelitian pada konsentrasi kepemilikan oleh institusi dilakukan oleh Brickley dkk. dalam Tri (2003). Ketiga penelitian tersebut mendukung pernyataan bahwa meningkatnya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan selain menguntungkan juga berpotensi menimbulkan kerugian. Apabila kepemilikan semakin terkonsentrasi maka pemegang saham akan merepresentasikan kepentingan mereka sendiri, yang mungkin berbeda dengan kepentingan investor lain, pekerja dan manajer. Potensi kerugian kedua adalah pemegang saham akan menanggung risiko yang besar karena kepemilikan tidak terdiversifikasi (Shleifer dan Vishny dalam Tri, 2003).

b) Ukuran Dewan Komisaris

Lipton *et al.* dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif dari pada dewan yang ukurannya kecil. Ini berarti bahwa makin banyak anggota

dewan komisaris maka badan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, di antaranya kesulitan berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen.

Berlawanan dengan penelitian penelitian yang Ujiyantho dan Pramuka (2007), Pranata dan Mas'ud (2003) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba. Ini berarti ukuran dewan komisaris yang lebih besar mampu mengurangi manajemen laba. Semakin sedikit anggota dewan komisaris maka tindak manajemen laba semakin banyak karena dengan sedikitnya anggota dewan komisaris memungkinkan organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam melaksanakan perannya.

c) Proporsi Dewan Komisaris Independen

Salah satu argumen mendasar bagi keterlibatan seorang komisaris independen di sebuah perusahaan adalah kontribusi vital mereka bagi mekanisme *checks and balance* sehingga para eksekutif tidak memperlakukan perusahaan seolah-olah milik pribadi (Nyoman dalam Nuryaman, 2007). Oleh karena itu, *independensi* merupakan suatu persoalan penting. Dengan kata lain, komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh corporate governance

Fama dan Jensen dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba. Dengan masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

d) Komite Audit

Berdasarkan Kep. 29/PM/2004 dalam Marihot dan Doddy (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai peranan penting dalam perusahaan, dimana komite audit bertugas untuk mengawasi laporan keuangan agar tindakan *opportunistic* manajemen dapat dikurangi.

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury *et al.*, dalam Marihot dan Doddy, 2007).

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan

eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Agung dalam Marihot dan Doddy, 2005).

B. Pengembangan Hipotesis

1. Kecakapan Managerial dan Manajemen Laba.

Kecakapan seorang manager dapat dilihat dari keahliannya dalam melakukan tanggungjawabnya. Keahlian itu biasa diukur dengan tingkat intelegensia dan pendidikan seorang manager yang tinggi. Semakin pengalaman seorang manager maka laba yang dihasilkan akan lebih tinggi. Sehingga, intensitas seorang manager dalam melakukan manajemen laba akan semakin tinggi. Isnugrahadi (2009) menguji pengaruh kecakapan managerial dengan manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kecakapan managerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, semakin cakap seorang manager maka kinerja manajer tersebut akan semakin baik sehingga laba yang dihasilkan semakin berkualitas. Seorang manager dikatakan cakap apabila manager tersebut memiliki keahlian yang memadai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terjadi karena ada beberapa kondisi dalam perusahaan yang tidak mendukung manajemen untuk bertindak jujur dalam melaporkan laba yang mencerminkan realitas ekonomi.

Kecakapan managerial yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah

kecakapan managerial dalam bidang keuangan yaitu seberapa efisien sebuah

perusahaan dalam bidang keuangan secara relatif terhadap perusahaan lain dalam industri yang sama. Tingkat keefisienan relatif sebuah perusahaan ini dinisbahkan sebagai hasil dari kecakapan seorang manager. Sebagai pengukur terhadap variabel kecakapan managerial ini, Demerjian dkk dalam Isnugrahadi (2009) menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Berdasarkan hasil kajian diatas tentang kecakapan managerial dengan manajemen laba, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kecakapan managerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2. Konsentrasi kepemilikan dan manajemen laba

Penelitian Sujoko dan Ugy dalam Nuryaman (2007) menyatakan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham maka pengawasan yang dilakukan pemilik terhadap manajemen akan semakin efektif. Manajemen akan semakin berhati-hati dalam memperoleh pinjaman, sebab jumlah utang yang semakin meningkat akan menimbulkan *financial distress*. Terjadinya *financial distress* akan mengakibatkan nilai perusahaan akan mengalami penurunan sehingga mengurangi kemakmuran pemilik. Mendukung pendapat Sujoko dan Ugy dalam Nuryaman (2007) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang

dimiliki manajemen. Hasil penelitian Yie (2007) menunjukkan konsentrasi kepemilikan memperbesar daya informasi akuntansi.

Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Jika ini dapat diwujudkan maka tindakan *moral hazard* manajemen berupa manajemen laba dapat dikurangi (Hubert dan Langhe dalam Nuryaman, 2007). Penelitian Nuryaman (2007) menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil kajian diatas tentang konsentrasi kepemilikan dengan manajemen laba, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Ukuran perusahaan dan manajemen laba

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi saham perusahaan tersebut semakin banyak. Albrecht & Richardson dalam Sylvia dan Siddharta (2005) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar

sehingga diduga ukuran perusahaan mempengaruhi pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunistik maka semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan laba (berhubungan positif). Moses dalam Nuryaman (2007) mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba (salah satu bentuk manajemen laba) dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik yang lebih besar.

Penelitian Marachi dalam Nuryaman (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar.

Hasil penelitian Nuryaman (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Peasnell, Pope dkk. Dalam Marhot dan Doddy (2007) menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dapat disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.

Hasil penelitian Sylvia dan Sidharta (2005), menemukan ukuran perusahaan

berhubungan negatif signifikan dengan manajemen laba. Penelitian ini didukung oleh

dalam Marihot dan Doddy (2007) menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Kecenderungan perusahaan besar kurang dalam melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan selalu menjaga kepercayaan masyarakat sehingga akan selalu menyajikan laporan keuangan yang benar.

Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan. Ini menunjukkan bahwa manajer perusahaan besar mendapat insentif yang lebih ketika dia melakukan manajemen laba demi mengurangi kos politisnya (Rahmawati dan Baridwan, 2006). Berdasarkan hasil kajian diatas tentang ukuran perusahaan dengan manajemen laba, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4. Ukuran dewan komisaris dan manajemen laba

Jensen dan Lipton dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting. Dewan komisaris

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Hasil penelitian Marihot dan Doddy (2007) serta Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan. Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit lebih mampu mengurangi indikasi manajemen laba daripada jumlah komisaris yang banyak.

Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit lebih mampu

Penelitian Xie, Davidson, Dadalt dkk. dalam Marihot dan Doddy (2007) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan, yang ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Artinya dewan komisaris dapat memaksimalkan fungsi monitoring terhadap manajer dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga mengurangi segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Yu dalam Nuryaman (2007) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh nilai akrual kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit dewan komisaris maka tindak manajemen laba makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil kajian diatas tentang ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

II : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen

5. Proporsi dewan komisaris independen dan manajemen laba

Fama dan Jensen dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dkk. Chtourou *et al.* , Pratana dan Mas'ud (2003), Xie, Biao, Wallace dan Peter dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi manajemen laba. Jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, maka penggunaan *discretionary accruals* akan semakin rendah.

Dari hasil pernyataan diatas, bahwa komisaris independen dapat menjadi seorang mediator ketika terjadi konflik kepentingan terkait dengan memanipulasi laporan keuangan. Marihot dan Doddy (2007) menunjukkan makin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Linda (2004) yang menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dapat dirumuskan dari hasil penelitian diatas bahwasannya dewan komisaris independen dalam jumlah

pengawasan kepada pihak manajemen yang optimal. Hal ini akan berdampak pada pelaporan keuangan berkaitan dengan laba. Penelitian yang dilakukan Nuryaman (2007) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Ujyantho dan Pramuka (2007) yang menemukan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ujyantho dan Pramuka (2007) menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (*pengendali/founders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun dan menjadikan dewan komisaris tidak independen sehingga perusahaan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil kajian diatas tentang proporsi dewan komisaris independen dengan manajemen laba, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap

6. Komite Audit dan Manajemen Laba

Komite audit merupakan pihak yang mempunyai peranan dalam mengawasi laporan keuangan dan mengamati sistem pengendalian internal perusahaan yang dapat berfungsi untuk mengurangi tindakan *opportunistic* manajemen untuk melakukan manajemen laba. Salah satu syarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau Perusahaan Publik adalah keberadaan dari Komite Audit, dan khususnya bagi BUMN merupakan suatu keharusan ini sesuai dengan keputusan dari Menteri BUMN Nomor: Kep-117/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance*. Diharapkan dengan adanya komite audit lebih mengefektifkan tugas dari komisaris perusahaan khususnya di dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap *Corporate Governance* yang ada di perusahaan, sehingga visi, misi, dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Semakin komite audit berperan atau melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan membawa dampak positif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang ada di perusahaan. Hasil penelitian Mariot dan Doddy (2007) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya bahwa komite audit yang telah menjalankan tugasnya secara efektif akan mampu mengurangi tindakan manajemen laba.

Penelitian Sylvia dan Siddarta (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu

mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian oleh Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001- 2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut.

Hasil penelitian Linda (2004) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba. Hal ini berarti secara rata-rata aktivitas manajemen laba pada perusahaan yang memiliki komite audit lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Penelitian Sylvia dan Siddharta (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda yaitu variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan.

Xie, Davidson, Dadalt dan Wilopo (2004), yang kesemuanya menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan. Penelitian ini memiliki hasil yang bertentangan dengan penelitian Veronica dan Utama (2005) yang melaporkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan

Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, artinya dengan adanya dewan komisaris dan komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih

leluasa. Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

7. *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan oleh Farrel M.I dan Fieldhouse M pada tahun 1957 di Inggris merupakan salah satu alternative dari pendekatan analisis kuantitatif. *Data Envelopment Analysis (DEA)* biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi relatif organisasi atau perusahaan. DEA dapat digunakan pada model input dan output banyak, , tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi proses pengubahan input dan output. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah semua input sama (Makhfatih:2000 dalam Karsinah). DEA merupakan prosedur yang dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang menggunakan input dan output yang banyak, dimana penggabungan input dan uotput tersebut tidak mungkin dilakukan. Satuan ukuran ini biasanya dinyatakan dalam *Decision Making Unit* atau Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE yang dibandingkan dengan efisiensi UKE lainnya dalam satu kesatuan populasi sampel. Di sini berlaku syarat bahwa UKE-UKE tersebut memiliki set data yang terdiri dari jenis *input* dan *output* yang sama. Menurut DEA, UKE dikatakan efisien jika rasio perbandingan *output/input* sama dengan 1 atau 100%, artinya UKE tersebut sudah tidak lagi melakukan pemborosan dalam penggunaan input inputnya dan atau mampu memanfaatkan secara

optimal kemampuan potensial produksi yang dimiliki sehingga mampu mencapai tingkat yang efisien. Suatu UKE dikatakan kurang efisien jika rasio perbandingan *output/input* bernilai antara $0 \leq \text{output/input} < 1$ atau nilainya kurang dari 100% artinya UKE. Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau pertimbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat sebagai berikut: tidak bernilai negatif, bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasio dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 atau ≤ 1 .

Analisis DEA didesain secara spesifik untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit produksi dalam kondisi terdapat banyak *input* maupun banyak *output*, yang biasanya sulit diatasi secara sempurna oleh teknik analisis pengukuran efisiensi lainnya (Silkman, 1986 dalam Sahid Susilo Nugroho 1995). Jadi secara singkat berbagai keunggulan dan kelemahan metode DEA adalah (Purwantoro, 2003):

Keunggulan DEA:

1. Bisa menangani banyak input dan output.
2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel *input* dan *output*.
3. UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) dibandingkan secara langsung dengan

Keterbatasan DEA:

1. Bersifat *sample specific*
2. Merupakan *extreme point technique*, kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal.
3. Hanya mengukur produktifitas relatif dari UKE bukan produktifitas absolute.
4. Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan.

C. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

